

Prabowo Ditelepon Raja Yordania, Ucapkan Selamat Hasil Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Raja Abdullah II dari Yordania mengucapkan selamat kepada calon presiden (capres) nomor utut 2, Prabowo Subianto, atas hasil Pemilu 2024. Ucapan selamat disampaikan melalui sambungan telepon.

"Saya sangat terhormat menerima ucapan selamat atas hasil sementara Pemilu dari sahabat saya, Yang Mulia Raja Abdullah II dari Yordania," tulis Prabowo dalam unggahannya di media sosial, Selasa (12/3).

"Kita berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk Raja Abdullah II beserta keluarga dan saudara-saudari kita di Yordania," kata Prabowo.

Dalam unggahannya, Prabowo menyertakan video pembicaraan dengan Raja Abdullah II melalui sambungan telepon. Prabowo berharap bisa menghubungi Raja Abdullah II beberapa waktu ke depan.

"Saya ingin menghubungi Anda mungkin beberapa pekan lagi memungkinkannya," kata Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Raja Abdullah II mempersilakan Prabowo untuk

menghubunginya. Namun, jika memungkinkan, Raja Abdullah II ingin bertemu langsung untuk memberikan selamat kepada Prabowo.

"Jika waktunya pas saya ingin datang dan ingin bertemu Anda dan memberi selamat untuk Anda secara langsung. Saya sangat berbahagia untuk Anda, saya tahu negara Anda membutuhkan Anda," ujar Raja Yordania itu.

"Saya kenal dengan Anda sejak lama, saya sangat bangga, kawanku," tambahnya.

Perbincangan hangat pun terjadi antara Prabowo dan Raja Abdullah II. Prabowo dan Raja Abdullah II merupakan sahabat lama, Prabowo punya kenangan dengan Amman, Ibu Kota Yordania. "Saya tidak sabar bertemu dengan Anda, saya memiliki banyak kenangan indah di Amman," ucap Prabowo.

Prabowo menitikkan salam untuk Pangeran Faisal dan Pangeran Ghazi dari Yordania. Sementara itu, Raja Abdullah II menyampaikan salam dari istrinya untuk Prabowo, karena gembira. ●han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



DEPORTASI WARGA JEPANG BURONAN INTERPOL

Wakapolres Barelang AKBP Syarifuddin (tengah) bersama Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Samuel Toba (kiri) dan Kasat Polairud Polresta Barelang AKP River Hutajulu (kanan) memberikan keterangan pers terkait penempatan pers terkait penempatan buronan Interpol berinisial YY di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepri, Selasa (12/3). Buronan Interpol terkait kasus penipuan tersebut dideportasi ke negaranya setelah ditangkap Sat Polairud Polresta Barelang saat hendak menuju Malaysia secara ilegal di perairan Batam pada 31 Januari 2024.

KPU Pastikan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Sah Meski Tak Diteken Saksi

Penghitungan suara Pemilu 2024 walau tanpa saksi tetap sah karena ada sejumlah dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August

Mellaz, mengatakan, hasil rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Sumatera

Selatan tetap sah meski saksi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi.

Hal ini disampaikan Mellaz menyusul adanya catatan khusus terkait saksi yang tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi, saat pro-

ses rekapitulasi suara Provinsi Sumatera Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Mellaz, nihilnya tanda tangan saksi merupakan hal wajar karena tak semua peserta pemilu memiliki saksi saat penghitungan suara.

"Tapi yang jelas di banyak hal, memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam atau misalnya saksinya memang tidak ada," ujar Mellaz.

Kendati demikian, penghitungan suara tanpa saksi tetap sah karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil. "Iya dong (tetap sah)," katanya.

Sebelumnya, rapat pleno terbuka mengungkapkan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak mau menandatangani formulir D hasil dan berita acara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan, saksi Anies-Muhaimin enggan

tanda tangan karena menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Saksi Anies-Muhaimin juga sempat melaporkan keberatan mereka usai pemungutan suara. Namun, Bawaslu menolak laporan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Hal yang sama juga dilakukan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Andika mengatakan, saksi Ganjar-Mahfud merasa keberatan karena menganggap Pilpres 2024 telah mencederai sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Mereka keberatan terhadap seluruh proses pemilu yang diduga penuh rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, hingga politik uang (money politics) yang menjadikan pemilu tidak demokratis. "Selanjutnya, keberatan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional, tidak akuntabel, serta secara kolektif melakukan pelanggaran," katanya. ●han

Politisi Nasdem Sebut Tak Ada Parpol yang Serius untuk Ajukan Hak Angket

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali, mengganggapi tidak ada partai yang serius mengajukan hak angket DPR RI, untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Ahmad Ali, hal itu terlihat dari sikap Partai Nasdem yang disampaikan sekretaris jenderal, Hermawi Taslim, bahwa partai politik (parpol) Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P terkait komitmen mendorong hak angket.

"Ini keyakinan tentang satu peristiwa kan, bahwa kebenaran politik itu kan tidak mutlak. Jadi kemudian kalau saling menyandera artinya tidak ada partai yang serius untuk itu," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (12/3).

Azmad Ali mengatakan, jika partai-partai itu serius, maka hak angket semestinya bisa langsung direalisasikan. Pasalnya, syarat pengajuannya untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI pun tak sulit. Hanya membutuhkan tanda tangan 25 anggota DPR RI minimal dari dua fraksi parpol yang berbeda.

"Artinya, tidak punya keyakinan dengan apa yang sedang kita lakukan. Angket ini hanya keyakinan dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya silahkan. Jadi tidak perlu membuat perjanjian dengan yang lain," kata Ali.

Ali pun mempertanyakan sikap parpol yang mendorong hak angket. Sebab, saat ini parpol yang dikatakan mendorong hak angket yaitu PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), masih berada

PAN Ragukan Klaim TPN Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Kapolda jadi Saksi di MK

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo meragukan klaim Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang ingin menghadirkan kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Membawa Kapolda sebagai saksi? Weleh-weleh hehe. Secara logika, saya meragukannya," kata Drajad kepada wartawan, Selasa (12/3).

Drajad menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Menghadirkan kapolda sebagai saksi, menurutnya, justru balik menimbulkan pertanyaan kepada TPN.

"Karena, jika memang ada kapolda yang menyaksikan pelanggaran TSM di wilayahnya, bukankah dia berwenang dan punya pasukan untuk mencegah bahkan menindak pelanggaran itu?"

tanya Drajad.

Meski begitu, PAN tetap menghormati pihak yang merasa ada kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan ingin menggugat ke MK. Ia berperandangan, cara seperti itu merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar.

"Saya bukan ahli hukum, tapi paham betul bahwa perkara di MK itu memerlukan bukti-bukti yang *beyond reasonable doubt*, dalam jumlah yang luar biasa. Ini berdasarkan pengalaman sebagai unsur pimpinan PAN sejak 2010," tutur Drajad.

Sebelumnya diberitakan, TPN Ganjar-Mahfud menyiapkan seorang kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK kelak.

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, sebelumnya mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengurangan aparat negara untuk

memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.

"Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan," kata Henry, dikutip dari siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3).

Selain kapolda, TPN Ganjar-Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Henry meyakini, perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun.

Ia menyebutkan, salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30 persen. ●han



KPU MALUKU UTARA HITUNG ULANG C-HASIL SAAT RAPAT REKAPITULASI

Petugas KPU menyiapkan kertas plano saat penghitungan ulang plano C-hasil pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 2024 tingkat Prov. Hotel Bela, Ternate, Maluku Utara, Selasa (12/3). KPU Prov. Maluku Utara menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu melakukan penghitungan ulang melalui plano atau C-hasil di 9 desa dan 103 TPS di Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan karena adanya ketidaksesuaian data perolehan suara untuk DPR-RI yang selisihnya mencapai 798 suara.

Selama Bulan Ramadhan, ASN Masuk Kantor Pukul 08.00

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN selama bulan Ramadhan.

"Kalau dulu setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan surat edaran (SE), tapi sekarang tidak lagi karena pengaturan jam kerja ASN selama Ramadhan terakomodir di Perpres Nomor 21/2023," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas, dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan-RB, Selasa (12/3).

"Memasuki bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, pemerintah telah menetapkan jam kerja para ASN sebagai upaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan," tegasnya.

Pada Perpres disebutkan bahwa jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu. Total waktu tersebut tidak termasuk jam istirahat. Untuk istirahat di hari Jumat ditetapkan selama 60 menit dan selain hari Jumat selama 30 menit.

Kemudian, pada bulan Ramadhan jam kerja instansi pemerintah dimulai pada pukul 08.00 sesuai

zona waktu setempat dan berlaku bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Instansi yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Perpres diundangkan.

Jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hari kerja yang tertuang dalam peraturan presiden ini tidak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI yang pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Sedangkan hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan. ●mei



KPU MENGESAHKAN PEROLEHAN SUARA PILPRES DI 11 PROVINSI

Ketau KPU Hasyim Asyari (kanan) bersama dengan Komisier KPU Yulianto Sudrajat (kiri) saat memimpin rapat pleno A rekapitulasi penghitungan surat suara Prov. Kalsel di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Pada hari ke-14 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 11 provinsi di tingkat nasional.

Dugaan Korupsi PT Taspen Ditaksir Rugikan Negara hingga Ratusan Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan PT Taspen (Persero). Dugaan korupsi yang terjadi pada 2019 lalu, diperkirakan merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungan nilai real nilai kerugiannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri yang dikutip Selasa (12/3).

Penyidik KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi modus investasi fiktif. Kasusnya sudah pada tahap penyidikan.

Kendati demikian, Ali belum membeberkan secara gamblang soal identitas dari para pihak yang sudah

ditetapkan tersangka. Menurut Ali, nama tersangka akan diumumkan sekaligus dengan konstruksi perkara.

"Konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka termasuk siapa saja yang menjadi Tersangka belum dapat

umumkan pada publik hingga kami anggap seluruh tahapan pengumpulan alat bukti ini cukup," ujarnya.

Ali pun memastikan akan menyampaikan setiap perkembangan kasus tersebut sebagai unsur keterbukaan. ●han